

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR : M.HH-12.PR.01.03 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 Desember 2020

**TIM PEMBINA KINERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2021**

- Penanggung Jawab : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Pengarah : 1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Sekretaris Jenderal
3. Inspektur Jenderal
- Pembina Wilayah I : 1. Direktur Jenderal Pemasarakatan
2. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
5. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Pembina Wilayah II : 1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan
Hak Asasi Manusia
3. Staf Ahli Bidang Sosial
4. Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan
- Pembina Wilayah III : 1. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi
4. Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- Pembina Wilayah IV : 1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia
3. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
4. Staf Khusus Menteri Bidang Isu-Isu Strategis
5. Sekretaris Ditjen Administrasi Hukum Umum
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia
- Pembina Wilayah V : 1. Direktur Jenderal Imigrasi
2. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
3. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan
4. Staf Khusus Bidang Transformasi Digital
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Wilayah I :

- a. Sekretariat Jenderal
- b. Inspektorat Jenderal
- c. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- d. Kantor Wilayah Aceh
- e. Kantor Wilayah Lampung
- f. Kantor Wilayah DKI Jakarta
- g. Kantor Wilayah Kalimantan Barat
- h. Kantor Wilayah Sulawesi Tengah
- i. Kantor Wilayah Maluku

Wilayah II :

- a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
- c. Kantor Wilayah Sumatera Utara
- d. Kantor Wilayah Bangka Belitung
- e. Kantor Wilayah Banten
- f. Kantor Wilayah Jawa Tengah
- g. Kantor Wilayah Kalimantan Selatan
- h. Kantor Wilayah Sulawesi Barat
- i. Kantor Wilayah Papua

Wilayah III :

- a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- b. Badan Pembinaan Hukum Nasional
- c. Kantor Wilayah Sumatera Barat
- d. Kantor Wilayah Jambi
- e. Kantor Wilayah Jawa Barat
- f. Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara
- g. Kantor Wilayah Sulawesi Selatan
- h. Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat
- i. Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Wilayah IV :

- a. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- c. Kantor Wilayah Riau
- d. Kantor Wilayah Sumatera Selatan
- e. Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta
- f. Kantor Wilayah Kalimantan Tengah
- g. Kantor Wilayah Sulawesi Utara
- h. Kantor Wilayah Gorontalo
- i. Kantor Wilayah Bali

Wilayah V :

- a. Direktorat Jenderal Imigrasi
- b. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
- c. Kantor Wilayah Kepulauan Riau
- d. Kantor Wilayah Bengkulu
- e. Kantor Wilayah Jawa Timur
- f. Kantor Wilayah Maluku Utara
- g. Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur
- h. Kantor Wilayah Papua Barat



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY